**STRATEGI PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Prakata**

 Buku bacaan yang menyangkut tentang Strategi pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sidah banyak beredar, terutama dikalagan birokrasi, dunia pendidikan dan Perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, namun yang menyangkut srategi pengembangan karir PNS rupanya buku ini sangat terbatas seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya persaingan global serta banyaknya masuk tenaga kerja asing ke Indonesia yang memiliki sumberdaya yang bagus serta penguasaan IT maka Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk mampu melihat peluang dan kesempatan untuk berkompetensi secara sehat dan terbuka sehingga menjadi Pegawai Negeri Sipil yang profesionalisme.

 Pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan efesien, efektif dan berkualitas tentu di dukung adanya sumber daya aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawabpunya integritas dan kredibilitas. Mencapai tujuan nasionai sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penggunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah seperti yang diutarakan di atas selama ini, tidak jauh bedanva dengan aplikasi teori elit seperti yang dikenal dalam referensi kehidupan politik di negara-negara maju. Teori ini menekannya bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada ditangan elit birokrasi pemerintah, akan tetapi juga pelaksanaan kekuasaan itu berada di tangan elit yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah tidak mempunyai akuntabilitas terhadap rakyat (Hunter; 1953 :59). Berlakunya otonomi daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya sain daerah, termasuk dalam menempatkan pegawainya di jabatan steruktural secara professional dan terbuka berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 16 Tahun 2012 lahir dengan tujuan untuk menghasilkan pejabat-pejabat struktural yang memiliki kompetensi. Hal yang baru dari peraturan tersebut adanya transparansi proses seleksi di mana untuk pengisian jabatan struktural harus dilakukan dengan mekanisme seleksi terbuka.

Pegawai Negeri Sipil dan sebagai aparatur pe

merintahan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara pemerintah dan pembangunan, maka dalam Modul Diklat Pim III " Hukum Administrasi Negara Penerbit LAN RI tahun 2008 " pada halaman 2 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pegawai Negeri Sipii wajib untuk :

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah serta vvajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
3. Menyimpan rahasia jabatan .
4. Mengangkat sumpah /janji Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
5. Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri.

6. Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, ( sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 53 tahun 2010 ) tentang disiplin PNS.

 Pengawasan merupakan suatu proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan, ditinjau dari segi kedudukan lembaga yang melaksanakan pengawasan, dibedakan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal serta untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan kompetensi PNS dengan misi setiap organisasi pemerintah, untuk memotivasi kinerja PNS perlu disusun pola karir dan pengembangan karir yang memungkinkan potensi PNS dikembangkan secara optimal, pengembangan SDM diperlukan guna mewujudkan pemerintahan yang propesional dan akuntabilitas.

**Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahuwata'ala atas segala curahan karunianya dan atas dorongan rekan rekan Dosen dan keluarga sehingga penulis mencoba menulis buku tentang strategi pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Penulis sangat menyadari tulisan ini jauh dari sempurna mengingat terbatasnya kemampuan penulis untuk menuliskan teori teori.

Berkenan dengan saran dan kritikan yang sifat membangun penulis sangat mengharapkan guna memparipurnakan kembali penulisan ini. Penulis tertarik menulis judul ini karena banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap pengembangan karir PNS yang erat kaitannya dengan politik. Semoga dengan selesainya tulisan ini akan ikut menambah wawasan tentang pengembangan karir.

.Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi tinggi sehingga diamanatkan dalam Undang Undang serta diinginkan oleh semua pihak hingga saat ini masih merupakan impian belaka dari pada kenyataan. Inti pokok yang diharapkan dengan menjalankan tugas pokoknya itu, diharapkan terciptanya sumberdaya manusia Pegawai Negeri Sipil yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi karena belum adanya pola kerja karir yang jelas serta belum adanya pengawasan yang jelas terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Semoga segala bantuan, budi baik, uluran tangan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis menjadi amal kebaikan yang mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

 NTB, Agustus 2019,

 Dr. Ida Surya, SH. MH